

ABSTRAK

Jaminan sosial merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan usia penerima manfaat jaminan hari tua antara BPJS dengan Perusahaan dan rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah. BPJS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menerapkan prinsip *good governance*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pemberian jaminan hari tua kepada tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian jaminan hari tua terhadap tenaga kerja purna tugas, mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pemberian jaminan sosial berupa jaminan hari tua kepada tenaga kerja oleh BP Jamsostek, dan menganalisis strategi agar pemberian jaminan sosial berupa jaminan hari tua kepada pekerja yang purna tugas dapat memenuhi kriteria akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum untuk tugas akhir ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang berhasil dikumpulkan melalui hasil studi pustaka, selanjutnya disajikan di dalam hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pemberian jaminan sosial berupa jaminan hari tua bagi tenaga kerja purna tugas belum sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang – undangan. Dibutuhkan upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. *Kedua*, BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas, terlebih yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. *Ketiga*, permasalahan yang terdapat dalam pelayanan publik di BPJS Ketenagakerjaan adalah penyimpangan prosedur dan pelayanan administrasi yang berlarut – larut, sehingga strategi yang dapat dilakukan dalam hal pemberian jaminan sosial berupa jaminan hari tua untuk dapat memenuhi kriteria akuntabilitas dalam pelayanan publik harus memenuhi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Jaminan hari tua, BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Old age security is a program created by the government to protect the workforce. In its implementation, there are differences in the age of old-age security beneficiaries between BPJS and the Company and low public trust in the Government. This study aims to determine the implementation of the principle of accountability in providing social security in the form of old-age security to workers by BPJS Ketenagakerjaan. Specifically, this study aims to determine and analyze the arrangements for providing social security in the form of old-age security for retired workers, determine and analyze the accountability of providing social security in the form of old-age security to workers by BP Jamsostek, and analyze strategies so that the provision of social security in the form of old-age security to retired workers can meet the criteria of accountability in public services.

The research method used in legal research for this final assignment uses legal research with a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature containing theoretical concepts which are then connected to the problems that will be discussed in this research. The data that was collected through the results of the literature study, then presented in the research results and analyzed qualitatively descriptive.

The results of the study show that the provision of social security in the form of old-age security for retired workers is not yet fully in accordance with the legal basis of laws and regulations. Regulatory alignment efforts are needed to optimize the acquisition of membership and benefit claim services. Second, BPJS Ketenagakerjaan has not fully implemented the principle of accountability, especially those related to the management of the Social Security Fund. Third, the problems found in public services at BPJS Ketenagakerjaan are procedural deviations and protracted administrative services, so that strategies that can be applied in terms of providing social security in the form of old-age security to be able to meet accountability criteria in public services must fulfill legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community and cultural factors.

Keywords: *Accountability, Old Age Security, BPJS Ketenagakerjaan*